**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah yang kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan ( peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya program, kebijakan, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki–laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta memproleh perlindungan.

Terbatasnya ketersediaan data gender dan anak menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki, perempuan dan anak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan diberbagai bidang kehidupan. Agenda pembangunan pasca era Millenium Development Goals (MDG’s) adalah SDGs (Sustainable Goals) dimana isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai perlakuan selain pengarusutamaan gender pemerintah juga memperioritaskan pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi dalam mengintegrasikan isu dan hak – hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA sebagai upaya untuk mengatasi hak – hak anak yang terabaikan.

Permasalahan ketidakadilan gender dan perlindungan terhadap anak ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan serta peran keluarga , tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan bagi anak diberbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi dimasa mendatang. Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender dan anak menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Landasan hukum yang menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 “Segala warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya telah diatur dalam pasal 4 ” Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diksriminasi” Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari ratifikasi Convention on the Rights of The Child ( CRC). Tujuan utama dari berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur atau dilihat dari adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat, akan tetapi diperlukan dukungan kebijakan setiap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional ini adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk didalamnya adalah tentang kesetaraan gender dan Anak . Misalnya, meningkatnya akses dan partisipasi di bidang pendidikan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan HAM, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menurunkan angka kriminalitas dan mewujudkan penegakkan HAM, serta praktik demokrasi yang sehat hingga di kalangan grasroot. Kondisi demikian ini akan menciptakan stabilitas sosial dan politik, sehingga berdampak pada stabilisasi berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya gambaran tolok ukur keberhasilan pembangunan di atas masih jauh dari harapan, khususnya terkait dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut, didefinisikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menggunakan dasar INPRES ini setiap lembaga dan satuan kerja perangkat daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bangka mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang responsif gender.

Inpres No. 9 tahun 2000 diperkuat oleh PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. PERMENDAGRI ini sebagai landasan operasional pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Kabupaten Bangka.

Dalam konteks ini, setiap satuan kerja (Satker) diwajibkan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga PUG menjadi ruh dalam pembangunan di segala bidang. Untuk melihat hasil pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, maka perlu menganalisis terlebih dahulu melalui data kuantitatif dan kualitatif tentang kesenjangan gender di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat dilakukan reformulasi kebijakan responsif gender melalui perencanaan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender adalah pembangunan yang mengintegrasikan secara riil tentang pengalaman, aspirasi, dan permasalahan perempuan, laki-laki dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Isu-isu strategis kesenjangan gender dan anak di Kabupaten Bangka masih memprihatinkan. Seputar permasalahan Hukum dan HAM seperti masih tingginya kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama, meningkatnya jumlah perempuan dan anak korban kriminalitas, tingginya jumlah kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak . Bidang Pendidikan masih menunjukan rendahnya angka partisipasi sekolah bagi perempuan dan anak pada jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama dan atas, disamping itu juga terlihat tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka. Bidang Kesehatan menunjukkan rendahnya kesadaran Ibu untuk memberikan ASI pada Anak, rendahnya kesadaran orang tua untuk mengimunisasikan bayi mereka, lebih dari itu angka kematian ibu juga relatif masih tinggi. Di bidang Politik keterlibatan perempuan dalam parlemen masih butuh peningkatan terutama pemenuhan kuota perempuan, disamping itu keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif juga sangat rendah berdasarkan capaian kinerja atau kepangkatan. Bidang sosial menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang belum tertangani dengan baik, disamping juga minimnya sarana pendidikan khusus bagi para defabel juga menjadi masalah tersendiri. Bidang ketenagakerjaan masih meninggalkan catatan dimana sektor formal masih didominasi oleh laki-laki, meskipun pada angkatan kerja antar Negara perempuan lebih banyak dibanding laki-laki namun mayoritas perempuan masih bekerja di bidang informal baik sebagai pembantu maupun pekerja lepas.

Kenyataan itu menunjukan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini masih terdapat kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki (tepatnya kesenjangan gender), baik dalam akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan maupun dalam penikmatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan, sosial budaya dan politik, dan pengambil keputusan, perlindungan anak dan berbagai aspek lainnya. Dalam bidang pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih banyak diberikan kepada laki-laki dibanding perempuan.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) sebagai sebuah upaya yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang resposif gender, maka diperlukan data terpilah sebagai input dan analisis sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemenuhan hak - hak anak. Data yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur sebagai dasar acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan profil Gender dan Anak merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi gender disuatu wilayah Kabupaten/Kota. Adanya nilai-nilai budaya patriarki di masyarakat yang masih kuat. Telah menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan. Selain itu adanya pemahaman yang sempit dari penjabaran makna nilai dalam agama, serta nilai-nilai budaya lainnya yang cenderung bias gender. Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tradisi lisan seperti norma atau etika yang berlaku, mempertajam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumber daya Profil Kabupaten Bangka akan sangat berguna dalam merencanakan berbagai kebijakan pembangunan. Meskipun diketahui bahwa data statistik yang ada telah menunjukkan beberapa data gender atau data terpilah, namun masih sangat terbatas pada data tertentu saja.

Mengingat pentingnya data gender dan anak dalam pembangunan maka di susunlah Buku Profil Gender dan Anak kabupaten Bangka Tahun 2020 yang memuat informasi tentang kondisi laki-laki dan perempuan yang berada disemua lembaga baik lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan gambaran serta informasi tentang kondisi anak – anak yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, dan kesehatan.

* 1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan buku profil gender dan anak adalah untuk menyajikan data terpilah yang memberikan gambaran mengenai kondisi perempuan maupun laki-laki dan anak di Kabupaten Bangka. Secara khusus buku profil gender dan anak kabupaten Bangka bertujuan untuk :

* Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender.
* Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender dan anak bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kabupaten Bangka.
* Meningkatkan komitmen untuk menggunakan statistik dan analisis gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Bangka.
* Sebagai bahan untuk mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
* Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, berupa data jumlah dan kondisi laki-laki, perempuan di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenagakerjaan politik, hukum perempuan.
* Tersedianya data terpilah tentang kondisi anak menurut jenis, kelamin dan umur yang dilihat dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan anak.
* Tersedianya informasi gender dan anak, yang dapat dijadikan dasar dalam perencana, pelaksana dan evaluasi kebijakan program yang ada.
* Menjadi pendorong bagi lembaga pemerintah dalam hal penyusunan data yang lebih responsif , yaitu menyiapkan data-data yang dipilah antar laki-laki dan perempuan, dan data anak yang mencakup dari segala aspek.

**1.3 Sumber Data**

Sumber data pada Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

* Data primer : data yang dikumpulkan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah , Dinas kependudukan dan Catatan Sipil , Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A.
  + Data sekunder : data/informasi yang diperoleh melalui wawancara pada sejumlah pejabat instansi kabupaten Bangka untuk melengkapi kekurangan data primer dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, lengkap dan spesifik tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dan anak di Kabupaten Bangka.

**1.4 Output (Luaran)**

* Informasi statistik gender dan Anak pada aspek pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, publik dan lainnya.
* Buku profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2020

**1.5 Outcome (Dampak)**

Buku Profil Gender dan Anak akan berdampak pada :

* Proses munculnya kesadaran bagi semua pihak khususnya bagi penyusunan kebijakan dalam merencanakan kegiatan dengan memperhatikan aspek kebutuhan laki-laki maupun perempuan dan anak
* Program akan lebih efektif baik dari aspek waktu dan biaya
* Capaian tujuan lebih tajam dan berkesinambungan.
* Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

**1.6 Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan :**

Memuat latar belakang penulisan profil gender dan anak Kabupaten Bangka, tujuan, sumber data, input, outcome (dampak), dan sistematika penulisan.

**Bab II Metodologi :**

Memuat tentang konsep gender, strategi pemberdayaan masyarakat berperspektif gender, lokasi penyusunan profil, teknik pengumpulan data, analisis data, model analisis pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.

**Bab III Gambaran Umum :**

Memuat tentang gambaran letak geografis, batas wilayah, gambaran Kabupaten Bangka, jumlah pegawai di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, dan pendidikan, sosial budaya

**Bab IV Demografi (kependudukan) :**

Memuat tentang informasi tentang penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, berdasarkan kelompok umur, kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan KIA.

**Bab V Pendidikan :**

Memuat tentang sarana dan prasarana sekolah, angka buta huruf, angka partisipasi sekolah berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

**Bab VI Kesehatan :**

Memuat tentang sarana dan prasarana kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan, jumlah dokter ahli menurut jenis kelamin, penolong persalinan, kunjungan/pelayanan kesehatan ibu hamil, imunisasi, jumlah kelahiran dan kematian bayi , partisipasi pemberian asi, status gizi pada balita, penderita HIV/AIDS.

**Bab VII Ketenagakerjaan :**

Memuat tentang jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

**Bab VIII Publik :**

Memuat tentang jumlah PNS Kabupaten Bangka berdasarkan golongan, jabatan, partisipasi perempuan bidang legislatif, partisipasi perempuan di yudikatif, jumlah narapidana berdasarkan jenis kelamin.

**Bab IX Kekerasan terhadap perempuan dan anak :**

Memuat tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT bedasarkan umur, jumlah kasus kekerasan terhadapa anak.

**Bab X Penutup :**

Memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi untuk pengambil keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bangka.

**BAB II**

**METODOLOGI**

* 1. **Konsep Gender**

Kata “gender‟ dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berhubungan dengan peran sosial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin biologisnya, dan pada gilirannya hak-hak, sumberdaya, dan kuasa. Tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan serta anak dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan anak sangat bervariasi di setiap masyarakat. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi, terdapat beberapa kemiripan yang khas, misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-laki. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda antara apa yang diperoleh oleh laki-laki dan apa yang diperoleh oleh perempuan.

Gender menjadi isu penting dan istilah yang sering diperbincangkan dalam proses pembangunan manusia baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Namun dari pengamatan, masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki.

Kesalahpahaman tentang konsep gender ini sebagai akibat dari belum dipahaminya secara utuh atau kurangnya penjelasan tentang konsep gender dalam memahami sistem ketidakadilan sosial dan hubungannya dengan ketidakadilan lainnya. Oleh karena itu untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks. Istilah gender dan seks seringkali digunakan secara bergantian meskipun pada dasarnya makna keduanya berbeda.

* 1. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender**

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individualto compete more effectively with other interests, by helping them to learn anduse in lobbying, using the media, engaging in political action, understandinghow to ‘work the system,’ and so on (Ife, 1995). Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapatmenyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Disisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan. ”Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada 5 proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, andsustainable” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai alternative development, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriateeconomic growth, gender equality and intergenerational equaty”. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta 6 pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannyadengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sejak ditetapkan dan dikeluarkannya Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia dan diberlakukannya instruksi presiden tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal, sehingga perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan,kesejahteraan perlindungan anak,penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG. Sehingga dalam implementasinya InPres tersebut di dukung dan dikawal oleh berbagai produk kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat lebih detail dan teknis dalam rangka pencapaian yang maksimal.

Lebih lanjut pemerintah Indonesia juga mengatur pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang diatur dalam Permendagri RI Nomor 67 Tahun 2011. PUG dalam peraturan tersebut pada intinya dimaksudkan dalam beberapa gagasan dan kepentingan sebagai berikut:

* 1. PUG dimaksudkan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kesetaraan gender, keadilan gender, analisis gender, perencanaan responsif gender, bahkan anggaran responsif gender. Dalam strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam segala bentuk level kebijakan.
  2. PUG secara keseluruhan diinstruksikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan hingga pemerintah desa, untuk melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan.
  3. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam proses pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, renstra SKPD, dll.
  4. **Lokasi Penyusunan Profil**

Buku profil gender dan anak akan mengambil data di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu dari 7 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Buku Profil Gender dan anak di susun dengan mengakumulasi data-data gender dan data anak yang berasal dari lembaga pemerintah baik dari departemen maupun non departemen, dinas maupun lembaga yang memiliki data terkait dengan analisis gender dan anak. Adapun bentuk data yang diakses adalah data sekunder, dan juga primer yang diperoleh melalui wawancara untuk memperjelas informasi yang di anggap perlu . Selain itu dilaksanakan juga Sosialisasi rencana penyusunan Profil Gender dan anak yang dilanjutkan dengan meminta masukan dari semua instansi yang terkait demi perbaikan data yang akan dibukukan.

* 1. **Analisis Data**

Analisis data dalam penyusunan Profil Gender dan Anak data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan. Dalam penyusunan Buku Profil Gender dan Anak, Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang mengacu pada analisis gender dengan lebih menonjolkan aspek komposisi data terpilah laki-laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan.

* 1. **Model Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender**
  + Model PROBA (problem based approach) Model analisa gender ini adalah suatu teknik untuk menganalisa kesenjangan gender (gender gap). Dengan demikian analisa gender dimulai dengan melihat kesenjangan gender yang selanjutnya dibentuk GFP (gender focal point) dan POKJA PUG dalam tataran pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengarusutamaan gender. Model analisa ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator seperti input, output, outcome dan proses.
  + Model analisa data gender dan anak menggunakan GAP (gender analysis pathway) Model atau kerangka analisa gender GAP merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan kebijakan/program/ proyek dari kegiatan pembangunan.
  + Analisa data anak menggunakan kerangka analisis pemenuhan hak anak. Beberapa metode analisis pemenuhan hak anak yang dapat digunakan antara lain : Analisis situasi ibu dan anak (ASIA), pendekatan anak berbasis sistem ( System Based Approach) dan saat ini sedang dikembangkan GAP-Plus.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM**

* 1. **Letak dan Geografis**

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang Km2  atau 302.879,47 Ha atau 3.028,794 Km2. Dengan luas daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh 3.021 Km2 atau 302.100 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka beriklim Tropis Type A dengan variasi curah hujan antara 0,8 hingga 311 mm tiap bulan. Suhu udara rata-rata Kabupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi pangkalpinang menunjukkan variasi antara 25,70C hingga 28,20 C dengan temperatur udara tertinggi 32,70 C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 70 hingga 86 persen sementara intensitas penyinaran matahari berkisar antara 21,9 % pada bulan januari sampai 85,3 % pada bulan September dan tekanan udara rata-rata berkisaran antara 1009,7 hingga 1012, 1 mb. Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai – sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut yang disebut kolong .

Secara geografis terletak antara 10 20 LU 30 LS dan 105 0 -1070 Bt. Memiliki luas daratan 11.524,14 Km2. Berada pada jalur internasional yang menghubungkan dua samudra dan dua benua, merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berdirinya kawasan industri maritim. Bangka dibatasi oleh laut dan selat sebagai berikut.

**Tabel 3.1**

**Batas Wilayah Kabupaten Bangka**

|  |  |
| --- | --- |
| Batas | Laut dan Selat |
| Di sebelah Utara | Laut Natuna |
| Di sebelah Selatan | Laut Jawa |
| Di sebelah Barat | Selat nangka |
| Di sebelah Timur | Selat Gaspar |

Jarak yang paling jauh dari ibu kota Kabupaten Bangka ke Ibukota Kabupaten lain adalah Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) kemudian Mentok (Kabupaten Bangka Barat).

**Tabel 3.2**

**Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) Ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Dari Sungailiat ke Ibukota  Kabupaten /Kota di Pulau Bangka | Jarak  (Km) |
| 1 | Toboali | 158 |
| 2 | Mentok | 140 |
| 3 | Koba | 90 |
| 4 | Pangkalpinang | 33 |

*Sumber: Bappeda Bangka*

Jumlah Kecamatan Ada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bangka, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungailiat Ibukota Kecamatan Sungailiat
2. Kecamatan Pemali Ibukota Kecamatan Pemali
3. Kecamatan Merawang Ibukota Kecamatan Baturusa
4. Kecamatan Mendo Barat Ibukota Kecamatan Petaling
5. Kecamatan Puding Besar Ibukota Kecamatan Puding Besar
6. Kecamatan Bakam Ibukota Kecamatan Bakam
7. Kecamatan Riau silip Ibukota Kecamatan Riau silip
8. Kecamatan Belinyu Ibukota Kecamatan Belinyu
   1. **Gambaran Kabupaten Bangka**

Kabupaten Bangka 11.524,14 Km2 yang tersebar di 8 Kecamatan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mendo Barat, Riau Silip dan Belinyu. Kecamatan Mendo Barat ibukota Kabupaten yang luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Luasnya suatu wilayah dan ketersediaan SDA akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat karena akan menjadi wilayah yang diminati untuk kegiatan ekonomi. Karena itu luas wilayah sangat potensi dalam mempercepat perkembangan. Bila luas wilayah didukung oleh keragaman sumberdaya alam (hayati), seperti pertanian, peternakan dan perikanan serta pertambangan, maka proses pembangunan akan menyentuh relasi gender. Kehidupan sosial dan ekonomi sangat tergantung pada tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

**Tabel 3.3**

**Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan  (1) | Uraian | |
| Luas Area (km²)  (2) | Luas Area (%)  (3) |
| 1. | Sungailiat | 146,38 | 4,96 |
| 2. | Pemali | 127,87 | 4,33 |
| 3. | Belinyu | 546,50 | 18,52 |
| 4. | Riau Silip | 523,68 | 17,75 |
| 5. | Bakam | 488,10 | 16,54 |
| 6. | Puding Besar | 383,29 | 12,99 |
| 7. | Merawang | 164,40 | 5,57 |
| 8. | Mendo Barat | 570,46 | 19,33 |
|  | **Jumlah** | **2950,68** | **100,00** |

*Sumber : BPS Kabupaten Bangka dalam angka Tahun 2020*

**Grafik 3.1**

**Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

**Tabel 3.4**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah (Orang) |
| Golongan I | | | |
| I/a | 0 | 0 | 0 |
| I/b | 2 | 0 | 2 |
| I/c | 1 | 2 | 3 |
| I/d | 9 | 3 | 12 |
| Golangan II | | | |
| II/a | 17 | 5 | 22 |
| II/b | 32 | 37 | 69 |
| II/c | 122 | 114 | 236 |
| II/d | 139 | 117 | 256 |
| Golongan III | | | |
| III/a | 171 | 304 | 475 |
| III/b | 225 | 520 | 745 |
| III/c | 232 | 507 | 739 |
| III/d | 238 | 288 | 526 |
| Golongan IV | | | |
| IV/a | 186 | 214 | 400 |
| IV/b | 115 | 211 | 326 |
| IV/c | 20 | 5 | 25 |
| IV/d | 1 | 0 | 1 |
| IV/e | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **1510** | **2327** | **3837** |

*Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tahun 2020*

**Grafik 3.2**

**Tabel 3.5**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  (Orang) |
| 1 | Fungsional Tertentu | 689 | 1.564 | 2.253 |
| 2 | Fungsional Umum | 424 | 438 | 862 |
| 3 | Struktural |  |  |  |
|  | Eselon V | 0 | 0 | 0 |
|  | Eselon IV | 267 | 283 | 550 |
|  | Eselon III | 106 | 35 | 141 |
|  | Eselon II | 24 | 7 | 31 |
|  | Eselon I | 0 | 0 | 0 |
| Total | | **1.510** | **2.327** | **3.837** |

*Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tahun 2020*

**Grafik 3.3**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

**Tabel 3.6**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka**

**Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendidikan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah**  **(Orang)** |
| 1 | SD | 6 | 3 | 9 |
| 2 | SMP | 15 | 6 | 21 |
| 3 | SMA | 335 | 260 | 595 |
| 4 | D-I | 64 | 93 | 157 |
| 5 | D-III | 154 | 425 | 579 |
| 6 | Tingkat Sarjana | 936 | 1.540 | 2.476 |
| ***Total*** | | **1.510** | **2.327** | **3.837** |

*Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tahun 2020*

**Grafik 3.4**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka**

**Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

Untuk Pegawai yang berasal dari tenaga kontrak / honorer berjumlah 52 (Lima puluh dua) orang yakni:

* + 1. Petugas Administrasi Pemerintahan : 35 (tiga puluh lima) orang;
    2. Sopir : 4 (empat) orang;
    3. Petugas Kebersihan : 2 (dua) orang;
    4. Penjaga malam : 2 (dua) orang;
    5. Penjaga malam ( Di Balai Penyuluh) : 9 (sembilan) orang;

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aset tanah dan bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yakni :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 1.794M2  yang merupakan tanah bangunan gedung terdiri dari :

Tanah bangunan gedung kantor (eks. BKKBN) seluas 1.794 M2, terletak di Jalan Pemuda No. 2 Sungailiat.

1. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari satu unit dengan luas lantai 288 M2, Musholla satu unit dengan luas 43,90 M2, Gudang Obat satu unit dengan luas 57 M2 , Rumah Dinas satu unit dengan luas 81 M2.

Selain itu Dinas DP2KBP3A memiliki 5 (lima) unit Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dengan luas masing 50 M2, yaitu :

1. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungailiat;
2. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pemali;
3. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mendo Barat;
4. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Puding Besar;
5. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Riau Silip;
6. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Belinyu;
7. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bakam;
8. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Merawang.
9. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka maupun bantuan dari Pemerintah Pusat.

1. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki dan mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka sampai dengan Desember 2020 sebanyak 6 (enam) unit kendaraan roda empat yang terdiri dari :

* 2 (dua) unit minibus Toyota Avanza ,
* 1 (satu) unit Mobil Unit Penerangan (Mupen),
* 1 (satu) unit Mobil Bus Pelayanan KB (Muyan),
* 1 (satu) unit Mobil Bus Antar Jemput Akseptor,
* 1 (satu) unit Mobil Unit Pelayanan Keliling (Molin) dan 14 (empat belas) unit Sepeda Motor.
  1. **Sosial Budaya**

Kabupaten Bangka dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya bidang Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Industri dan Pertambangan serta perdagangan hal inilah yang mendorong pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat baik dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Wilayah Kabupaten Bangka merupakan wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong (eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Potensi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bangka juga berpotensi untuk pengembangan budidaya laut antara lain untuk komoditas kakap, kerapu, dan rumput laut. Perairan laut Kabupaten Bangka juga menyimpan potensi non ikan yaitu untuk pengembangan wisata bahari dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan penambangan lepas pantai.

Perkebunan di Kabupaten di bagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Produksi komoditas perkebunan rakyat terdiri dari antar lain lada, karet, kelapa dan coklat. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh 12 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit. Untuk pembangunan di sektor industri ditingkatkan dan diarahkan agar semakin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi. Di Kabupaten Bangka ada 693 industri, yang terdiri dari industri besar sebanyak 23 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.157 orang, Industri sedang sebanyak 27 perusahaan dengan tenaga kerja 1.*463* orang sedangkan industri kecil rumah tangga sebanyak 647 perusahaan dengan 2.924 orang tenaga kerja. Dari aspek agama, Masyarakat Kabupaten Bangka mayoritas Islam dengan komposisi mencapai 85,43%. Selebihnya agama Kristen Protestan, Katolik dan Hindu. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Jumlah Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bangka**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KECAMATAN** | **AGAMA** | | | | | | |
| **ISLAM** | **KRISTEN** | **KATHOLIK** | **HINDU** | **BUDDHA** | **KONGHUCHU** | **LAINNYA** |
| **SUNGAILIAT** | 71.848 | 3.987 | 1.513 | 14 | 10.716 | 3.833 | 497 |
| **PEMALI** | 29.776 | 891 | 313 | 2 | 1.950 | 973 | 166 |
| **BELINYU** | 38.766 | 1.304 | 751 | 9 | 7.458 | 855 | 244 |
| **RIAU SILIP** | 24.705 | 492 | 398 | 0 | 1.748 | 402 | 94 |
| **BAKAM** | 17.937 | 101 | 15 | 0 | 310 | 96 | 19 |
| **PUDING BESAR** | 19.416 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| **MERAWANG** | 25.165 | 572 | 390 | 0 | 2.064 | 1.460 | 278 |
| **MENDO BARAT** | 48.472 | 217 | 120 | 3 | 115 | 62 | 25 |
| ***JUMLAH*** | ***276.085*** | ***7.569*** | ***3.500*** | ***28*** | ***24.366*** | ***7.681*** | ***1.323*** |
| ***PERSENTASE*** | ***86,13*** | ***2,36*** | ***1,09*** | ***0,01*** | ***7,60*** | ***2,40*** | ***0,41*** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan catatan sipil Tahun 2020*

**BAB IV**

**DEMOGRAFI**

Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya, karena penduduk merupakan aset yang sangat penting bagi suatu daerah. Jumlah penduduk menjadi ukuran dalam menilai perkembangan pembangunan. Namun disisi lain penduduk dapat pula menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu jumlah penduduk perlu diarahkan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta kebutuhan pembangunan agar dapat memberikan manfaat maksimal.

Dalam dinamika pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, peran dan fungsi penduduk sangat strategis oleh karenanya pembangunan bidang kependudukan selalu mendapat tempat utama. Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan Hal ini disebabkan oleh akhir dari setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan mutu penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kwalitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri karateristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Pada bab ini akan dapat menunjukkan kondisi perkembangan laki-laki , perempuan dan anak dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu informasi tentang komponen komponen kependudukan seperti jumlah, komposisi, serta distribusi penduduk menurut umur dan per jenis kelamin sangat diperlukan sebagai dasar pembangunan selanjutnya dan harus selalu dipantau perkembangannya.

* 1. **Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Tahun 2020. Jumlah penduduk secara keseluruhan 326.265 jiwa yang terdiri atas 168.526 orang laki-laki dan 157.739 orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu 52 %, sedangkan penduduk perempuan 48 %. Pada Tabel 4.1 menunjukan kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbesar yaitu 92.883 jiwa dan di ikuti oleh kecamatan Mendo Barat sebesar 51.133 jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Bakam hanya sebesar 19.039 jiwa. Lebih jelasnya ditampilkan tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kecamatan** | **Jenis Kelamin** | | |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1. | Sungailiat | 47.421 | 45.462 | 92.883 |
| 2. | Pemali | 17.784 | 16.921 | 34.705 |
| 3. | Belinyu | 25.715 | 24.485 | 50.200 |
| 4. | Riau Silip | 14.700 | 13.590 | 28.290 |
| 5. | Bakam | 10.095 | 8.944 | 19.039 |
| 6. | Puding Besar | 10.244 | 9.175 | 19.419 |
| 7. | Merawang | 15.791 | 14.805 | 30.596 |
| 8. | Mendo Barat | 26.776 | 24.357 | 51.133 |
|  | **Total** | **168.526** | **157.739** | **326.265** |

*Sumber : BPS Kabupaten Bangka dalam angka Tahun 2020* .

Pada Tabel 4.1. menunjukan dari 8 Kecamatan terdapat 326.265 penduduk persentase jumlah penduduk perempuan tidak terlalu berbeda yaitu 157.739 jiwa atau 48,34% dan laki laki 168.526 jiwa atau 52,15%. Lebih jelasnya dapat di lihat pada diagram di bawah ini.

**Grafik 4.1**

* 1. **Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penduduk adalah aset pembangunan, dengan demikian komposisi umur akan menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang produktif. Komposisi penduduk menurut struktur umur biasanya dinyatakan dalam kelompok umur belum produktif (0-14 tahun), umur produktif (15-64 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas). Umur produktif dikaitkan dengan aktivitas dalam bekerja yang sudah bisa menghasilkan barang dan jasa. Sehingga penduduk yang dinyatakan berusia produktif apabila memasuki masa usia kerja. Untuk di Kabupaten Bangka usia produktif disesuaikan dengan standar nasional yaitu wajib belajar 15 Tahun. Informasi tentang jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang , pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan Kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

| **Kelompok**  **Umur (Thn)** | **Jumlah Penduduk** | | **Total** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 0-4 | 13.740 | 13.047 | 26.787 |
| 5-9 | 13.273 | 12.829 | 26.102 |
| 10-14 | 14.680 | 13.897 | 28.577 |
| 15-19 | 14.765 | 13.700 | 28.465 |
| 20-24 | 14.437 | 13.649 | 28.086 |
| 25-29 | 13.833 | 13.008 | 26.841 |
| 30-34 | 14.627 | 13.452 | 28.079 |
| 35-39 | 13.780 | 12.354 | 26.134 |
| 40-44 | 12.885 | 11.637 | 24.522 |
| 45-49 | 11.270 | 10.262 | 21.532 |
| 50-54 | 9.366 | 8.429 | 17.795 |
| 55-59 | 7.423 | 6.958 | 14.381 |
| 60-64 | 5.772 | 5.599 | 11.371 |
| 65-69 | 4.371 | 4.219 | 8.590 |
| 70-74 | 2.475 | 2.365 | 4.840 |
| 75+ | 1.829 | 2.334 | 4.163 |
| **Jumlah** | **168.526** | **157.739** | **326.265** |

*Sumber : BPS Kabupaten Bangka dalam angka Tahun 2020*

**Grafik 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

Dari Tabel 4.2. nampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar berada pada kelompok umur dewasa 227.206 jiwa atau 69,63 % (kisaran 15 – 64 Tahun). Selanjutnya terdapat kelompok umur lanjut (65 tahun keatas ) sebesar 17.593 jiwa atau 5,39 %. Dengan demikian dapat dikatakan komposisi penduduk Kabupaten Bangka sangat mendukung proses percepatan pembangunan.

Data terpilah dari komposisi umur penduduk berdasarkan Gender sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program yang responsif gender. Karena dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan umur akan memudahkan mencapai tujuan. Seperti upaya peningkatan peran perempuan disuatu wilayah. Akan lebih jelas disusun dengan mengacu pada data jumlah dan komposisi umur terbesar. Selain itu program dapat direncanakan sesuai kebutuhan perempuan dengan kondisi karakteristik umur tersebut. Data komposisi penduduk yang di pilah berdasarkan kelompok umur dan gender akan bermanfaat untuk di prediksi seperti aspek kesejahteraan. Dengan banyaknya penduduk usia produktif maka akan mendorong dinamika pembangunan daerah karena meningkatnya berbagai kegiatan masyarakat.

Penduduk usia non produktif yaitu usia 65 Tahun ke atas terdapat 5,39%. Persentase ini menunjukan cukup besar jumlah penduduk usia lanjut. Yang menggambarkan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Bangka.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Berdasarkan Usia 0-18 Tahun**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA KECAMATAN | TAHUN 2020 | | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1. | Sungailiat | 15.643 | 14.495 | 30.138 |
| 2. | Belinyu | 8.190 | 7.821 | 16.011 |
| 3. | Merawang | 5.341 | 4.851 | 10.192 |
| 4. | Mendo Barat | 9.141 | 8.548 | 17.689 |
| 5. | Pemali | 6.168 | 5.770 | 11.938 |
| 6. | Bakam | 3.240 | 3.101 | 6.341 |
| 7. | Riau Silip | 4.919 | 4.711 | 9.630 |
| 8. | Puding Besar | 3.439 | 3.230 | 6.669 |
| **KAB.BANGKA** | | **56.081** | **52.527** | **108.608** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka*

**Grafik 4.3**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Berdasarkan Usia 0-18 Tahun**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa penduduk usia 0-18 tahun di kabupaten Bangka berjumlah 108.608 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 56.081 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 52.527 jiwa. Penduduk terbanyak berada di kecamatan Sungailiat yakni sebanyak 30.138 jiwa dan disusul dengan kecamatan Mendo Barat sebanyak 17.689 jiwa. Adapun kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bakam hanya sebesar 6.341 jiwa.

* 1. **Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk Anak**

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatakan akte kelahiran. Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia.

Hak sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seorang anak sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 5 yaitu “ setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana yang dimaksud dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut akte kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak sipil anak adalah mendapatkan akte kelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kabupaten Bangka yang sedang mengembangkan Kabupaten layak Anak (KLA) juga berusaha untuk memenuhi 31 hak anak, salah satunya yaitu anak layak mendapatkan identitas. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan akte kelahiran. Untuk mengetahui data kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**

**Persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki akta kelahiran dan yang tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH | USIA 0-18 TAHUN | KEPEMILIKAN AKTA 0-18 TAHUN | | BELUM MEMILIKI AKTA 0-18 TAHUN | |
| PENDUDUK | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| 1 | SUNGAILIAT | 92408 | 30138 | 27661 | 91,80% | 2477 | 2,28% |
| 2 | BELINYU | 49387 | 16011 | 14896 | 93,00% | 1115 | 1,03% |
| 3 | MERAWANG | 29929 | 10192 | 9370 | 91,90% | 822 | 0,76% |
| 4 | MENDO BARAT | 49014 | 17689 | 16709 | 94,50% | 980 | 0,90% |
| 5 | PEMALI | 34071 | 11938 | 10791 | 90,40% | 1147 | 1,06% |
| 6 | BAKAM | 18478 | 6341 | 6058 | 95,50% | 283 | 0,26% |
| 7 | RIAU SILIP | 27839 | 9630 | 9235 | 95,90% | 395 | 0,36% |
| 8 | PUDING BESAR | 19426 | 6669 | 6386 | 95,80% | 283 | 0,26% |
| TOTAL | | 320552 | 108608 | 101106 | 93,10% | 7502 | 6,91% |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka*

**Grafik 4.4**

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-18 tahun anak yang telah memiliki akte kelahiran di Kabupaten Bangka sekitar 101.106 jiwa atau 93,1 % dan anak yang belum memiliki akte kelahiran sekitar 7.502 jiwa atau 6,91 % dari anak usia 0-18 tahun. Dilihat dari keseluruhan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Bangka yang sudah mencapai angka 93,1% yang berarti kepemilikan akte kelahiran sudah cukup bagus atau tinggi. Selain itu dapat dilihat juga bahwa kecamatan Sungailiat memiliki angka tertinggi jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran yaitu sebesar 2.447 jiwa atau sekitar 2,28%, disusul kecamatan Pemali sebesar 1.147 atau sekitar 1,06%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya rendah di tingkat kabupaten/kota.

* 1. **Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Mulai tahun 2016, seluruh anak wajib memiliki KTP dalam bentuk kartu identitas anak (KIA). Segala ketentuan dan kebijakan mengenai KIA ini mengacu pada Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak.

Secara umum KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak-hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Untuk mengetahui data kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**

**Persentase anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA dan yang tidak memiliki kartu KIA di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH ANAK <17 TAHUN | ANAK MEMILIKI KIA | | ANAK BELUM MEMILIKI KIA | |
| JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| 1 | SUNGAILIAT | 27.166 | 12774 | 47,02% | 14392 | 52,98% |
| 2 | BELINYU | 14337 | 5087 | 35,48% | 9250 | 64,52% |
| 3 | MERAWANG | 9177 | 1933 | 21,06% | 7244 | 78,94% |
| 4 | MENDO BARAT | 15914 | 4019 | 25,25% | 11895 | 74,75% |
| 5 | PEMALI | 10842 | 5445 | 50,22% | 5397 | 49,78% |
| 6 | BAKAM | 5722 | 2427 | 42,42% | 3295 | 57,58% |
| 7 | RIAU SILIP | 8739 | 2937 | 33,61 | 5802 | 66,39% |
| 8 | PUDING BESAR | 6031 | 985 | 16,33 | 5046 | 83,67% |
| **TOTAL** | | **97.928** | **35.607** | **36%** | **62321** | **63,64%** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka*

**Grafik 4.5**

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-17 tahun anak yang telah memiliki kartu identitas anak di Kabupaten Bangka sekitar 35.607 jiwa atau 36 % dan anak yang belum memiliki kartu identitas anak sekitar 62.321 jiwa atau 63,64 % dari anak usia 0-17 tahun. Dilihat dari keseluruhan kepemilikan kartu identitas anak Kabupaten Bangka hanya mencapai angka 36 % yang berarti kepemilikan kartu identitas anak masih sangat rendah atau kurang dari anak yang belum memiliki kartu identitas anak. Dimana kecamatan Puding Besar memiliki angka yang sangat rendah dari jumlah penduduk yang sudah memiliki kartu identitas anak yaitu sebesar 985 jiwa atau sekitar 16,33%, disusul kecamatan Merawang sebesar 1.933 atau sekitar 21,06%.

**BAB V**

**PENDIDIKAN**

Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang paling berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidikan. Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan tolak ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah (APS) penduduk berdasarkan jenis kelamin di berbagai jenjang pendidikan, angka putus sekolah/angka buta huruf, guru dan kepala sekolah serta sarana dan prasarana sekolah . Pendidikan merupakan tolak ukur pembangunan sumber daya manusia , disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi).

**Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003** Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaanya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain”.

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyosong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang malakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga , biaya, dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik. Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

**UU 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia, karenanya setiap warga negara indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/sederajat dan SMP/sederajat). Melalui UU tersebut pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpatisipasi dalam kegiatan sekolah.** Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (nation character building).

Pendidikan mempunyai makna yang lebih luas dari pembelajaran, tetapi pembelajaran merupakan sarana yang ampuh dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran di kelas, dimana ada pendidik yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan. Proses pembelajaran merupakan proses yang mendasar dalam aktivitas pendidikan di sekolah. Dari proses pembelajaran tersebut siswa memperoleh hasil belajar yang merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar yaitu mengalami proses untuk meningkatkan kemampuan mentalnya dan tindak mengajar yaitu membelajarkan siswa. Untuk lebih jelas tentang konsep pembelajaran penulis uraikan dalam pokok bahasan tersendiri tentang pembelajaran.

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.

Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah “pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak, orang Romawi memandang pendidikan sebagai “educare”, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai “Erzichung” yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbart pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada peserta didik kepada yang diinginkan sipendidik yang diistilahkan dengan Educere.

Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam bekarya dan bermasyarakat serta melalui bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya bagi perempuan dan anak. Pendidikan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerja sama antara perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

Berdasarkan Buku Statistik Gender di beberapa Kabupaten diketahui bahwa kesepakatan yang mengarahkan pendidikan yang berkeadilan gender dengan program yang mengarahkan pendidikan yang berkeadilan gender Penjelasan berkaitan dengan bidang pendidikan, akan menjelaskan kondisi sarana pendidikan serta mengenai jumlah sarana sekolah, jumlah penduduk yang buta huruf, angka partisipasi sekolah (APS), dan pendidikan tertinggi yang di tamatkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia indonesia yang dijamin oleh Undang -Undang Dasar 1945. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan. Tetapi sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa pendidikan lebih diutamakan untuk kaum laki-laki dibanding perempuan, karena ada norma masyarakat yang menganggap bahwa perempuan di butuhkan untuk membantu mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan membantu penghasilan rumah tangga sehingga menyebabkan pendidikan kaum perempuan masih tertinggal dibanding kaum laki-laki. Saat ini jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayagunakan. Tanpa menyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader- kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

* 1. **Sarana dan Prasarana Sekolah**

Pendidikan yang merata dan berkelanjutan memerlukan dukungan yang besar dari semua kalangan baik dari pemerintah pusat terlebih lagi dari masyarakat, hal yang paling utama adalah tersedianya fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana sekolah. Pada tabel 5 ditunjukkan jumlah sarana sekolah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Jumlah Sarana Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Jumlah** | **Guru** | | **Murid** | |
| **L** | **P** | **L** | **P** |
| **Sekolah Negeri** | | | | | |
| **TK** | 8 | 1 | 46 | 360 | 361 |
| **SD** | 166 | 466 | 1.113 | 16.862 | 15.698 |
| **SMP** | 32 | 166 | 420 | 5.479 | 5.488 |
| **Swasta** | | | | | |
| **TK** | 64 | 3 | 215 | 1.554 | 1.477 |
| **SD** | 15 | 37 | 122 | 1.764 | 1.553 |
| **SMP** | 12 | 56 | 75 | 1.445 | 1.089 |
| **Jumlah** | **297** | **729** | **1.991** | **27.464** | **25.666** |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2020*

Pada Tabel 5.1 nampak jumlah sarana terbesar pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 166 buah, kemudian SLTP sebesar 32 buah. Besarnya jumlah sarana pendidikan pada tingkat dasar ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas anak di Kabupaten Bangka. Karena diketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas jumlah penduduk salah satu indikatornya adalah meningkatkan lama pendidikan anak. Berdasarkan temuan diketahui bahwa tumbuh kembang kemampuan IQ seseorang anak dimulai pada usia dini (sampai 5 tahun ) kemudian tahap usia sampai 9 tahun. Selebihnya peningkatan IQ hanya sekitar 20% lagi. Dengan demikian ketersediaan pendidikan pada SD dan SLTP sederajat sangatlah menunjuang upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Bangka. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Suasana belajar mengajar akan terasa lebih hidup, dan minat mencari ilmu pengetahuan bagi murid-murid akan tinggi. Perkembangan IPTEK dalam bidang pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan manusia-manusia yang bergelut didalamnya.

Pada Tabel nampak bahwa untuk sekolah TK hanya ada 1 orang guru laki-laki. Data ini merupakan gambaran yang paling nyata dari efek adanya peranan gender di masyarakat. Laki-laki dinilai tidak memiliki “sensitifitas” dalam mendidik anak kecil (TK), Karena asumsi yang mengurus anak adalah perempuan. Padahal secara biologis laki-laki dan perempuan memegang peranan yang berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaan peran gender baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama. Kondisi ini juga tergambar dari akumulasi rata-rata guru perempuan yaitu 73,1 % dan laki-laki 26,8 %. Besarnya perbedaan persentasi gender pada guru juga adalah gambaran bahwa pada tingkat dasar perempuan dianggap lebih “cocok” . Hal ini Nampak dari angka jumlah guru perempuan (73,1%) jauh lebih besar dari guru laki-laki yang hanya (26,8%). Lebih jelasnya sarana sekolah menurut jenjang pendidikan dapat pada Grafik 5.1 berikut:

**Grafik 5.1**

* 1. **Angka Buta Huruf**

Buta huruf adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan suatu masyarakat. Dalam dunia pendidikan kegiatan membaca dapat dipandang sebagai jantungnya pendidikan. Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Begitu pentingnya tingkat keaksaraan sehingga penuntasan buta huruf atau aksara menjadi suatu yang diperlukan.

Penuntasan buta huruf atau aksara merupakan suatu investasi sumber daya manusia yang mempengaruhi berbagai aspek-aspek lain seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Keseriusan pemerintah juga terlihat dengan dikeluarkannya Inpres RI NO. 5 Tahun 2006 tentang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta huruf atau aksara.

Pemerintah telah mengagendakan masalah penanganan buta huruf sebagai salah satu kebijakan yang penting. Hal ini disadari memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas SDM sesuai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha-usaha tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Angka melek huruf menjadi data yang sangat diperlukan untuk kepentingan menilai kualitas manusia disuatu wilayah. Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberatasan buta huruf dimana masih sangat tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD. Selain itu juga digunakan untuk menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi serta menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih perlu mendapat perhatian.

Pada Tabel berikut disajikan data mengenai jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin menunjukan bahwa jumlah perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis sekitar 1 % dari total jumlah penduduk penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak bisa baca tulis. Adapun laki-laki sebanyak 0 %. Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel Berikut:

**Tabel 5.2**

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kemampuan Membaca** | **Jenis Kelamin** | | **Total** |
| **Laki-Laki**  **(%)** | **Perempuan**  **(%)** |
| **Dapat Membaca dan Menulis** | 51% | 48% | 99% |
| **Tidak Dapat** | 0% | 1% | 1% |
| **Jumlah** | **51%** | **49%** | **100%** |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2020*

Pada Tabel nampak bahwa jumlah perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis sebesar 1% lebih besar dari laki-laki yaitu 0 %. Sebaliknya jumlah perempuan yang bisa baca tulis lebih kecil dari laki-laki yaitu 48 %.

Gambaran data gender ini bahwa baik laki-laki maupun perempuan perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kemampuan baca tulisnya. Meskipun data yang ditampilkan tidak menjelaskan tentang kemampuan baca tulis ini apakah aksara Indonesia atau daerah. Mengingat masih banyak masyarakat di pedesaan yang tidak bisa baca tulis, tetapi mampu membaca tulisan bahasa daerah dan juga bahasa arab. Karena itu data ini perlu di kaji lebih dalam lagi untuk mengetahui ketidakmampuan ini, termasuk menemukan penyebab adanya kesenjangan perbandingan tersebut. Pada diagram ditunjukan kemampuan membaca/menulis berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Grafik 5.2**

* 1. **Angka partisipasi Sekolah (APS)**

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah pada tingkat usia tertentu dengan jumlah seluruh anak pada tingkat umur tersebut. Angka partisipasi sekolah sangat terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar serta keinginan masyarakat untuk aktif dalam sekolah.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah, antara lain ditunjukan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Partisipasi sekolah yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun non formal, apakah tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk yang masih sekolah dapat digunakan untuk mengukur tingkat perluasan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukan semakin luasnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya.

Data tentang angka partisipasi sekolah Kabupaten Bangka tersaji pada tabel 5.3 berikut.

**Tabel 5.3**

**Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis kelamin dan kelompok umur sekolah** | **Tidak/Belum Pernah Sekolah** | **Masih Sekolah** | **Tidak Sekolah lagi** |
| Laki-laki | | | |
| 7-12 Tahun | 0.00 | 100 % | 0.00 % |
| 13-15 Tahun | 0.00 | 94.42 % | 5.58 % |
| 16-18 Tahun | 0.81 | 69.99 % | 29.20 % |
| 19-24 Tahun | 0.00 | 22.51 % | 77.49% |
| 7-24 Tahun | 0.16 | 68.77 % | 31.06% |
| Perempuan | | | |
| 7-12 Tahun | 0.00 | 99.21 % | 0.79 % |
| 13-15 Tahun | 0.00 | 97.85 % | 2.15 % |
| 16-18 Tahun | 0.00 | 75.24 % | 24.76 % |
| 19-24 Tahun | 0.00 | 28.21% | 71.79 % |
| 7-24 Tahun | 0.00 | 73.89 % | 26.11 % |
| Jumlah | | | |
| 7-12 Tahun | 0.00 | 99.61 % | 0.39 % |
| 13-15 Tahun | 0.00 | 96.26 % | 3.74 % |
| 16-18 Tahun | 0.42 | 72.50 % | 27.08 % |
| 19-24 Tahun | 0.00 | 25.16 % | 74.84 % |
| 7-24 Tahun | 0.08 | 71.27 % | 28.65 % |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka*

**Grafik 5.3**

**Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Tahun 2020**

Berdasarkan Tabel 5.3 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2020 memberikan gambaran tentang partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun. Sebagian besar penduduk usia 7-24 tahun masih bersekolah yaitu 71.27%. Sedangkan 0.08% tidak/belum pernah sekolah dan 28.65% sudah tidak sekolah lagi. Bila dilihat dari kelompok umur, terlihat bahwa pada usia 7 tahun sampai 18 tahun ( jenjang SD sampai dengan SMA) partisipasi sekolah masih cukup tinggi, tetapi pada usia 19 sampai dengan 24 tahun (jenjang perkuliahan) terlihat masih rendahnya partisipasi sekolah. Bila dilihat berdasarkan usia dan jenis kelamin diketahui bahwa rata-rata persentase angka partisipasi sekolah (APS) Perempuan lebih tinggi yaitu 74,88% dari rata-rata persentase angka partisipasi sekolah (APS) laki-laki yaitu 71.14%. Data ini menunjukan bahwa cukup tinggi partisipati gender pada pendidikan di Kabupaten Bangka.

* 1. **Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan**

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi maka kualiatas SDM diwilayah tersebut juga semakin bagus. SDM yang berkualitas ini akan mudah terserap dalam dunia kerja dan pada akhirnya akan menaikan tingkat pendapatan. Dengan demikian secara tidak langsung tingkat pendidikan yang baik juga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Besarnya angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai salah satu indikator ukuran keberhasilan pendidikan serta lamanya pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkatan pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusia secara umum akan semakin tinggi , ini akan berdampak pula pada segi ekonominya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kondisi ekonomi masyarakat akan semakin baik. Untuk mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Bangka dapat di lihat pada Tabel 5.4. Pada Tabel 5.4 nampak bahwa penduduk di Kabupaten Bangka yang menamatkan sampai jenjang SI sederajat terdiri dari perempuan 4.07 % dan laki-laki 3.57 % . Selanjutnya pada pendidikan dasar SD perempuan 21.38% dan laki-laki yaitu 20.78% nampak perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Data ini memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka masih banyak pada tingkat SD dan SMA.

**Tabel 5.4**

**Jumlah Penduduk usia di atas 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Bangka**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| SD | 41.169 | 42.354 | 83.523 |
| SMP | 21.482 | 19.411 | 40.893 |
| SMA | 31.796 | 26.680 | 58.476 |
| Diploma  I/II/III/Akademi/Universitas | 7.082 | 8.066 | 15.149 |
| Jumlah | 101.529 | 96.512 | 198.041 |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2020*

Secara umum data gender menunjukkan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka jumlah yang menamatkan pendidikannya mulai SD sampai sarjana berimbang, lebih jelasnya dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Grafik 5.4**

**BAB VI**

**KESEHATAN**

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Salah satu indikator menilai kesejahteraan suatu bangsa adalah derajat kesehatan masyarakatnya. Permasalahan bidang kesehatan yang paling mendasar adalah belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap daerah. Selain itu masih tingginya pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan tertentu juga menambah daftar permasalahan kesehatan. Padahal untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, tiga hal tersebut mutlak harus dibenahi atau diselesaikan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Karena itu perhatian pemerintah terhadap kesehatan terus ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Perhatian tersebut diwujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah pengadaan dan memanfaatkan kesehatan. Penambahan dan peningkatan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

Terkait dengan itu pelayanan kesehatan perempuan dan anak-anak dapat dilihat dari beberapa layanan yang diberikan, diantaranya pelayanan imunisasi, pelayanan keluarga berencana, layanan kesehatan terhadap pengidap HIV/AIDS, layanan ibu hamil, dan sebagainya.

Isu kesehatan merupakan indikator penting dalam proses pembangunan manusia terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan utama pembangunan Index Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu kesehatan juga termasuk salah satu hak dasar masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Faktor pembangunan kesehatan ini berimplikasi secara langsung kepada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Pada bab ini, selanjutnya akan disajikan serta dipaparkan berbagai data kondisi pembangunan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Data yang ditampilkan juga disertai dengan data terpilah gender, sehingga diketahui berbagai permasalahan gender baik kesetaraan maupun ketimpangan yang terjadi dalam akses, peran, kontrol maupun manfaat dalam bidang kesehatan.

Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan terjadinya perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitar untuk hidup sehat, Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata sehingga dapat menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social maupun ekonomis.

Kesetaraan gender dalam bidang kesehatan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan dengan visi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu di ketahui ada tidaknya isu gender yang muncul di bidang ini yang akhirnya mengakibatkan kesetaraan gender. Pada bahasa bab ini akan diungkapkan beberapa kondisi ibu, anak dan balita serta sarana penunjang kesehatan. Pada setiap bagian akan diperlihatkan data-data mengenai kondisi dan posisi penduduk baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai sumber yang akan mengungkapkan berbagai isu gender pada bidang kesehatan.

**Sarana Prasarana**

Sarana prasarana merupakan penunjang untuk tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Bangka. Pada Tabel 6.1 diperlihatkan sarana prasarana yang tersedia.

**Tabel 6.1**

**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fasilitas Kesehatan** | **Jumlah** |
| Rumah Sakit  Rumah Sakit Bersalin Swasta  Puskesmas  Puskesmas Pembantu  Puskesmas Keliling  Posyandu  Klinik Balai Kesehatan  Praktek Dokter  Praktek Bidan  Apotik | 7  0  12  35  0  235  0  31  35  39 |
| **Jumlah** | **394** |

*Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2020*

**Grafik 6.1**

**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka**

**Tahun 2020**

Pada Tabel 6.1 nampak bahwa fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu, praktek bidan dan puskesmas pembantu. Banyaknya fasilitas kesehatan ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bangka dan penduduk yang menyebar di 8 kecamatan kota. Karena itu posyandu, praktek bidan, puskesmas pembantu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat bagi masyarakat serta kondisi tempat tinggal penduduk yang tersebar di daerah sehingga masyarakat lebih memilih ke pelayanan kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan hanya akan berfungsi optimal bila di tunjang oleh petugas kesehatan dan tenaga medis seperti yang ditampilkan pada tabel 6.2 berikut:

**Tabel 6.2**

**Jumlah dan Persentase Tenaga Medis dan Kesehatan**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tenaga Kesehatan Medis** | **Jumlah** | **Persentase**  **(%)** |
| Dokter umum  Dokter gigi  Apoteker  Bidan  Perawat  Dukun  Tenaga Teknisi  Kefarmasian  Lainnya | 207  30  76  386  1027  0  0  133  1385 | 6,38  0,92  2,34  11,90  31,66  0  0  4,1  42,7 |
| **Jumlah** | **3244** | **100%** |

*Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2020*

Pada tabel 6.2 belum nampak data gender antara tenaga medis dan kesehatan laki-laki atau perempuan. Kecuali bidan adalah perempuan. Namun secara umum menunjukan tidak ada tenaga dukun yang berarti bahwa masyarakat kabupaten Bangka tidak menggunakan tenaga dukun. Grafik berikut menunjukkan jumlah dan persentase tenaga medis dan kesehatan di Kabupaten Bangka.

**Grafik 6.2**

Pada tabel selanjutnya diperlihatkan komposisi dokter ahli berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 6.3**

**Banyaknya Dokter Ahli Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokter Spesialisasi** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Total** |
| Penyakit Dalam  Kebidanan  Anak  Bedah  Anastesi  Radiologi  Syaraf  THT  Kesehatan Jiwa  Kulit Kelamin  Mata | 7  8  2  8  4  3  3  2  2  1  0 | 3  3  7  0  2  2  1  1  2  2  5 | 10  11  9  8  6  5  4  3  4  3  5 |
| **Jumlah** | **40** | **28** | **68** |

*Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2020*

**Grafik 6.3**

**Banyaknya Dokter Ahli Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka**

**Tahun 2020**

**Penolong Persalinan**

Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu tebesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas.

Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan, dan lain-lain. Sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih. Program pemerintah mengarahkan lebih ditingkatkannya pertolongan persalinan akan lebih ideal bila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lebih profesional yaitu dokter, bidan, atau tenaga medis lain. Pada tabel 6.4 disajikan data penolong persalinan di Kabupaten Bangka Tahun 2020 .

**TABEL 6.4**

**JUMLAH PENOLONG PERSALINAN DI KABUPATEN**

**BANGKA TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Puskesmas | Tenaga Kesehatan  ( Nakes) | | Dukun (Paraji) | |
| ABS | % | ABS | % |
| 1 | Sungailiat | 740 | 101,51 | 0 | 0 |
| 2 | Sinar Baru | 224 | 94,92 | 0 | 0 |
| 3 | Kenanga | 842 | 92,63 | 0 | 0 |
| 4 | Pemali | 649 | 100,00 | 0 | 0 |
| 5 | Bakam | 318 | 82,60 | 0 | 0 |
| 6 | Belinyu | 560 | 85,63 | 0 | 0 |
| 7 | Gunung muda | 238 | 90,15 | 0 | 0 |
| 8 | Riau Silip | 519 | 94,19 | 0 | 0 |
| 9 | Batu Rusa | 758 | 100,00 | 0 | 0 |
| 10 | Puding Besar | 342 | 85,71 | 0 | 0 |
| 11 | Petaling | 805 | 100,00 | 0 | 0 |
| 12 | Penagan | 200 | 81,30 | 0 | 0 |
|  | **Kab.Bangka** | **6195** | **94,08** | **0** | **0** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka*

**GRAFIK 6.4**

**JUMLAH PENOLONG PERSALINAN DI KABUPATEN BANGKA**

**TAHUN 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya proses persalinan. Dimana persalinan ibu melahirkan sudah banyak ditangani oleh tenaga kesehatan yaitu sebesar 94,08 % sedangkan untuk bukan tenaga kesehatan atau dukun sebesar 0 %.

**Kunjungan / Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( K1/K4)**

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja. Pelayanan pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif/peningkatan dan preventif/pencegahan.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan pertama kali oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan. Cakupan kunjungan/pelayananan ibu hamil ( K1 dan K4) di kabupaten Bangka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 6.5 dibawah ini.

**Tabel 6.5**

**CAKUPAN KUNJUNGAN/PELAYANAN IBU HAMIL (K1/K4)**

**DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Puskesmas | Jlh Bumil | Jlh Bulin | Kelahiran hidup | | | Jumlah lahir hidup | K1 | K4 |
| Lk | Pr | total | ABS | ABS |
| 1 | Sungailiat | 778 | 729 | 320 | 304 | 624 | 624 | 784 | 753 |
| 2 | Sinar Baru | 248 | 236 | 115 | 113 | 228 | 228 | 256 | 219 |
| 3 | Kenanga | 952 | 909 | 424 | 442 | 866 | 866 | 928 | 788 |
| 4 | Pemali | 680 | 649 | 327 | 291 | 618 | 618 | 680 | 680 |
| 5 | Bakam | 404 | 385 | 201 | 166 | 367 | 367 | 341 | 310 |
| 6 | Belinyu | 685 | 654 | 312 | 311 | 623 | 623 | 579 | 562 |
| 7 | Gunung muda | 276 | 264 | 124 | 127 | 251 | 251 | 255 | 231 |
| 8 | Riau Silip | 578 | 551 | 282 | 243 | 525 | 525 | 569 | 552 |
| 9 | Batu Rusa | 794 | 758 | 370 | 352 | 722 | 722 | 794 | 794 |
| 10 | Puding Besar | 418 | 399 | 176 | 204 | 380 | 380 | 387 | 309 |
| 11 | Petaling | 842 | 805 | 407 | 386 | 793 | 793 | 842 | 842 |
| 12 | Penagan | 257 | 246 | 115 | 119 | 234 | 234 | 245 | 182 |
|  | **Kab.Bangka** | **6.912** | **6.585** | **3.173** | **3.058** | **6.231** | **6.231** | **6.660** | **6.222** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka*

Pada tabel 6.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah cakupan kunjungan atau pelayanan ibu hamil K1 sejumlah 6660 dimana kunjungan K1 paling tinggi di kecamatan Sungailiat yaitu 1968 kunjungan dan yang paling rendah di kecamatan Bakam yaitu 341 kunjungan. Sedangkan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 6222 dimana kunjungan atau pelayanan paling tinggi di kecamatan Sungailiat sebanyak 1760 kunjungan dan kunjungan paling rendah di kecamatan bakam sebanyak 310 .

**6.4 Imunisasi**

Imunisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi yang memberikan kekebalan/daya tahan pada tubuh manusia. Sejak ditemukannya teknologi di bidang kesehatan yaitu imunisasi yang diberikan kepada bayi/balita untuk mencegah penyakit yang biasa menyerang anak, telah berdampak pada usia balita, diketahui bahwa anak usia balita sangat rentan terkena berbagai jenis penyakit yang mungkin dapat mengakibatkan kematian. Pemberian imunisasi umumnya dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun pertama sebagai tindakan preventif terhadap masukannya berbagai jenis penyakit ke dalam tubuh. Dengan imunisasi anak akan terhindar dari penyakit berbahaya. Sehingga anak akan dapat beraktivitas, bermain, dan belajar tanpa harus terganggu oleh masalah kesehatan. Namun sayangnya dapat dilihat dilapangan massih banyak ditemukan anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya imunisasi, mitos yang salah tentang imunisasi, terlambatnya jadwal imunisasi. Selayaknya balita diberikan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu. Dikenal berbagai jenis imunisasi untuk bayi dan balita, antara lain BCG, Campak, DPT dan Polio. Pada tabel 6.6 di sajikan data mengenai cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2020.

**Tabel 6.6**

**Jumlah Balita Menurut Pemberian Imunisasi**

**Di Kabupaten BangkaTahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **BCG** | **Campak** | **DPT** | **Polio** | **Jumlah** |
| Sungailiat  Pemali  Belinyu  Riau silip  Bakam  Puding Besar  Merawang  Mendo Barat | 1819  617  836  491  340  377  690  1022 | 1371  577  826  478  347  361  694  885 | 4222  1851  2475  1459  1038  1147  2070  2672 | 5707  2541  3291  1960  1386  1525  2750  3604 | 13119  5586  7428  4388  3111  3410  6204  8183 |
| **Jumlah** | **6192** | **5539** | **16934** | **22764** | **51429** |

*Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2020*

**Grafik 6.6**

**Jumlah Balita Menurut Pemberian Imunisasi**

**Di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

Pada tabel nampak bahwa belum dibuat data terpilah dari balita yang di imunisasi. Pentingnya data gender balita adalah untuk mengetahui status dan kondisi balita laki-laki dan perempuan.

**Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi**

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Angka kematian bayi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi, terutama saat kehamilan dan melahirkan. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir, sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Data mengenai jumlah kelahiran bayi dan kematian bayi menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 6.7 berikut:

**Tabel 6.7**

**Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Hidup** | | **Meninggal** | |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | Sungailiat  Pemali  Belinyu  Riau silip  Bakam  Puding Besar  Merawang  Mendo Barat | 859  327  436  282  201  176  370  522 | 859  291  438  243  166  204  352  505 | 17  4  2  7  9  5  0  5 | 6  3  1  6  5  4  2  2 |
| **Jumlah** | | **3.173** | **3.058** | **49** | **29** |

*Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2020*

**Grafik 6.7**

**Partisipasi Ber KB**

Keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan sudah sejak lama. Program keluarga berencana lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui KB perlu diperhatikan agar tercapai keluarga sejahtera.Tingkat kesadaran keluarga untuk berpartisipasi ber KB sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun masih diperlukan upaya-upaya untuk mengajak akseptor muda. Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada aspek sosial budaya. Ketidakseimbangan antara perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memperlambat proses pembangunan daerah. Karena itu Program Keluarga Berencana (KB) terus digiatkan. Pada Tabel 6.8 menunjukkan alat KB yng paling banyak yang digunakan adalah suntik dan pil masing-masing 42,93 % dan 21,26 %. Selebihnya adalah implant, spiral, MOW/ MOP dan kondom. Kejelasan data ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 6.8**

**Jumlah penduduk wanita usia 15-49 Tahun yang berstatus Pernah Kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan di Kabupaten Bangka**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alat KB yang sedang digunakan** | **Jumlah** | | **Presentase** |
| **Pemerintah** | **Swasta** |
| **MOW/MOP**  **AKR/IUD/Spiral**  **Suntikan KB**  **PIL KB**  **Kondom**  **Implant** | 595  786  4.509  2.216  237  2.245 | 583  439  17.791  8.824  1.803  776 | 2,26%  2,36%  42,93%  21,26%  3,92%  5,82% |
| **Jumlah** | **10.588** | **30.216** | **78,55%** |

*Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2020 (Jumlah PUS : 51.938)*

**Grafik 6.8**

**Jumlah Balita Menurut Pemberian Imunisasi**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

Berdasarkan pendekatan kebutuhan gender, maka partisipasi perempuan yang besar dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan tingkat perumbuhan penduduk masih bias gender. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi laki-laki dalam berKB. Meskipun diketahui jenis alat dan cara laki-laki hanya menggunakan kondom dan tubektomi yang kurang diminati laki-laki.

**Usia Perkawinan Pertama**

Usia perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum . Usia kawin pertama memiliki relevansi dengan kesiapan perempuan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini terkait dengan kematangan fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi yang juga akan bermuara pada tingkat kesejahteraan kaum perempuan. Usia perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam keluarga berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis, disamping itu bagi usia perkawinan pertama yang masih tergolong muda akan mengakibatkan anak tidak memperoleh hak atas pendidikan, hak bermain, kehilangan masa remaja dan kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman hidup. Usia perkawinan pertama di Kabupaten Bangka tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 6.9 dibawah ini :

**TABEL 6.9**

**USIA PERKAWINAN PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Desa/Kel./Kec. | Jumlah Perkawinan | Usia Pengantin | | | | | | | |
| Laki-laki | | | | wanita | | | |
| -19 | 19-21 | 21-30 | 30+ | -16 | 16-21 | 21-30 | 30+ |
| 1. | Sungailiat | 476 | 3 | 42 | 286 | 145 | 0 | 73 | 296 | 107 |
| 2. | Belinyu | 148 | 1 | 5 | 105 | 37 | 8 | 31 | 91 | 18 |
| 3. | Merawang | 233 | 1 | 14 | 182 | 36 | 1 | 55 | 160 | 17 |
| 4. | Mendo Barat | 349 | 14 | 21 | 257 | 54 | 13 | 76 | 232 | 27 |
| 5. | Pemali | 150 | 0 | 7 | 116 | 26 | 1 | 36 | 93 | 19 |
| 6. | Bakam | 148 | 3 | 28 | 75 | 44 | 5 | 38 | 75 | 23 |
| 7. | Riau Silip | 147 | 0 | 13 | 97 | 37 | 0 | 56 | 74 | 16 |
| 8. | Puding Besar | 144 | 0 | 11 | 105 | 64 | 1 | 48 | 73 | 26 |
|  | **JUMLAH** | **1.795** | **22** | **144** | **1.223** | **405** | **29** | **420** | **1.090** | **253** |

*Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Bangka*

**6.8 Lama Pemberian ASI**

Salah satu tugas seorang ibu adalah memberikan bayinya ASI, karena kesehatan sebagai modal penting dalam pembangunan SDM, utamanya generasi bangsa yaitu anak (Bayi) yang tidak lepas dari proses tumbuh kembang anak. Salah satu indikator berlangsungnya pertumbuhan anak yang baik apabila pemberian asi eksklusif dilakukan sejak bayi. Karena berdasarkan penelitian diketahui pada air susu ibu terdapat zat pertumbuhan dan antibody yang tak dapat dibuat oleh teknologi apapun. Oleh sebab itu upaya pemberian asi pada anak usia bayi untuk jangka waktu tertentu sangatlah penting. Pada tabel 6.10 berikut ditunjukkan jumlah pemberian asi pada usia bayi sampai 1 Tahun.

**Tabel 6.10**

**Jumlah bayi yang diberikan ASI Eksklusif**

**Di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

| **No** | **Kecamatan** | **Pemberian ASI** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah ( Jiwa)** | **ASI Ekslusif** |
| **1.** | **Sungailiat** | 1461 | 912 |
| **2.** | **Pemali** | 184 | 149 |
| **3.** | **Belinyu** | 653 | 540 |
| **4.** | **Riau Silip** | 506 | 456 |
| **5.** | **Bakam** | 247 | 196 |
| **6.** | **Puding Besar** | 180 | 162 |
| **7.** | **Merawang** | 396 | 322 |
| **8.** | **Mendo Barat** | 787 | 568 |
| **Jumlah** | | **4.414** | **3.305** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2020*

**Grafik 6.9**

**Jumlah bayi yang diberikan ASI Eksklusif**

**Di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

**6.9 Status Gizi Pada Balita**

Menurut ahli gizi ada beberapa faktor penyebab terjadinya gizi kurang pada anak balita yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung penyebab gizi kurang pada anak adalah faktor makanan atau asupan gizi yang kurang. Sedangkan faktor tidak langsung adalah penyakit infeksi, kedua faktor itu saling mendorong. Kekurangan asupan gizi disebabkan oleh terbatasnya asupan makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat makanan secara baik. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan tubuh yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tabel 6.11 berikut ini ditunjukkan jumlah balita kurang gizi di Kabupaten Bangka Tahun 2020

**TABEL 6.11**

**JUMLAH BALITA KURANG GIZI DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Puskesmas | Balita Gizi  Kurang Tahun 2020 | % |
| 1 | Sungailiat | Sungailiat | 0 | 0,00 |
| Sinar Baru | 21 | 2,14 |
| Kenanga | 31 | 0,96 |
| 2 | Pemali | Pemali | 24 | 0,75 |
| 3 | Bakam | Bakam | 20 | 1,14 |
| 4 | Belinyu | Belinyu | 28 | 0,96 |
| Gunung muda | 73 | 6,94 |
| 5 | Riau silip | Riau silip | 26 | 1,00 |
| 6 | Merawang | Batu rusa | 49 | 1,79 |
| 7 | Puding Besar | Puding Besar | 14 | 0,67 |
| 8 | Mendo barat | Petaling | 16 | 0,46 |
| Penagan | 59 | 5,43 |
| **Jumlah** | | | **361** | **1,29** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui balita yang bergizi kurang sebanyak 361 orang. Dimana Kecamatan Belinyu merupakan kecamatan dengan jumlah balita gizi kurang tertinggi yaitu sebesar 101 orang dan diikuti oleh kecamatan Mendo Barat sebesar 75 orang. Adapun kecamatan yang jumlah balita gizi kurang yang paling sedikit adalah kecamatan Puding Besar hanya sebesar 14 orang.

**6.10 Penderita HIV/ AIDS**

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawwan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan , tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS . AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Pada tabel 6.12 berikut ini ditunjukkan Jumlah Penderita HIV/ AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2020

**Tabel 6.12**

**Jumlah Penderita HIV/ AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kelompok Umur | HIV dan AIDS | | | |
| TAHUN 2020 | | TAHUN 2019 | |
| L | P | L | P |
| 1 | < 4 Tahun | 0 | 0 | 1(10 BLN) | 1(3,7TH) |
| 2 | 5-14 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15-19 Tahun | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20-24 Tahun | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 25-49 tahun | 15 | 14 | 13 | 16 |
| 6 | >50 tahun | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Total | | 26 | 18 | 21 | 21 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah penderita HIV/ AIDS menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka sebanyak 44 orang. Dimana jumlah laki –laki lebih besar dibandingkan jumlah perempuan yaitu 26 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.

**VII**

**KETENAGAKERJAAN**

**Ketenagakerjaan**

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju. Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan , karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. Kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh negara, seperti tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang masuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Yang masuk dalam katagori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (Pensiun, cacat dan sebagainya).

**Tabel 7.1**

**Jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendidikan Pencari Kerja** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Total** |
| Tidak Tamat SD | 0 | 0 | 0 |
| SD | 1 | 0 | 1 |
| SLTP | 3 | 0 | 3 |
| SLTA | 91 | 70 | 161 |
| Diploma | 13 | 7 | 20 |
| SI | 37 | 30 | 67 |
| S2 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **145** | **107** | **252** |

*Sumber : DINAKERPERINDAG Kab. Bangka Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka sebanyak 252 orang. Dimana terlihat bahwa jumlah pencari kerja laki –laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan yaitu 145 orang laki-laki dan 107 orang perempuan. Sedangkan dilihat dari pendidikan jumlah pencari kerja lebih banyak yaitu tamatan SMA/SLTA sebanyak 161 orang.

**BAB VIII**

**PUBLIK**

**PNS**

PNS merupakan abdi negara, yang bertugas melayani masyarakat. Pada tabel 8.1 ditunjukkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 8.1**

**Jumlah PNS Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Golongan** | **L** | **P** | **Total** |
| 1. | Golongan I | 12 | 5 | 17 |
| 2. | Golongan II | 310 | 273 | 583 |
| 3. | Golongan III | 866 | 1619 | 2485 |
| 4. | Golongan IV | 322 | 430 | 752 |
|  | **Jumlah** | **1510** | **2327** | **3837** |

*Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2020*

Pada Tabel diatas terlihat potensi PNS perempuan lebih tinggi dari PNS laki-laki dimana pada Golongan III terdapat 64,76 % dan golongan IV 19,59 %. Namun dalam posisi struktural tidak terlihat perempuan pada pengambil keputusan. Pada berikut diperlihatkan komposisi gender pada jabatan sebagai berikut:

**Tabel 8.2**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan** | **L** | **P** | **Total** |
| 1. | Pejabat Struktural | 397 | 325 | 722 |
| 2. | Pejabat Fungsional | 1.113 | 2.002 | 3.115 |
|  | **Jumlah** | **1.510** | **2.327** | **3.837** |

*Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2020*

Bila Tabel 8.1 dibandingkan dengan tabel 8.2, Nampak bahwa perempuan yang banyak di golongan III dan IV tidak memiliki posisi strategis . Hal ini dapat dijadikan isu gender untuk menilai faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan pada kedudukan strategis.

**Tabel 8.3**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Eselon**

**se-Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kedudukan** | **L** | **P** | **Total** |
| 1. | Fungsional Umum | 424 | 438 | 862 |
| 2. | Fungsional Tertentu | 689 | 1564 | 2253 |
| 3. | Eselon I | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Eselon II | 24 | 7 | 31 |
| 5. | Eselon III | 106 | 35 | 141 |
| 6. | Eselon IV | 267 | 283 | 540 |
| **Jumlah** | | **1.510** | **2.327** | **3.837** |

*Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2020*

* 1. **Partisipasi perempuan pada bidang legislatif**

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan karena partai politik menjadi salah satu jenjang bagi seorang menjadi anggota parlemen. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan. Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam lembaga legislatif masih jauh dari memadai. Partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota dewan langsung dari masyarakat. Pada Tabel partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Pada Tabel berikut ditunjukan jumlah komposisi gender di DPRD Bangka Tahun 2020. Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa anggota DPRD banyak jenis kelamin laki-laki yaitu 82.86 % sedangkan untuk perempuan hanya 17,14 %.

**Tabel 8.4**

**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bangka Periode 2020**

**Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Fraksi** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Total** |
| 1. | PDI-P | 6 | 1 | 7 |
| 2. | Golkar | 4 | 1 | 5 |
| 3. | PPP | 3 | - | 3 |
| 4. | Gerindra | 4 | 1 | 5 |
| 5. | Demokrat | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Nasdem | 3 | 1 | 4 |
| 7. | PKS | 2 | - | 2 |
| 8. | PAN | 1 | - | 1 |
| 9. | Hanura | 1 | - | 1 |
| 10. | PBB | 2 | 1 | 3 |
|  | **Jumlah** | **29** | **6** | **35** |

*Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2020*

* 1. **Partisipasi Perempuan di Yudikatif**

Sebagaimana di legislatif, maka di bidang yudikatif juga akan dilihat komposisi gendernya. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi gender di TNI dan Polri yang menggambarkan dominasi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang mengangap bidang ini lebih cocok untuk laki-laki. Sehingga persentase perempuan sangat kurang.

**Tabel 8.5**

**Jumlah Personil TNI dan Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin**

**Di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pangkat** | **L** | **P** | **Total** |
| I. Perwira Pertama  a. Mayor Club  b. Kapten INF | 1  - | -  - | 1  - |
| II. Bintara Tinggi  a. Pembantu Letnan Satu  b. Pembantu Letnan Dua | 1  3 | -  - | 1  3 |
| III. Bintara  a. Sersan Mayor  b. Sersan Kepala  c. Sersan Satu  d. Sersan Dua | 2  -  7  4 | -  -  -  - | 2  -  7  4 |
| IV. Tantama  a. Kopral Kepala  b. Kopral Satu  c. Kopral Dua | -  1  1 | -  -  - | -  1  1 |
| V. PNS  a. Gol II B | - | 1 | 1 |
| **Jumlah** | **20** | **1** | **21** |

*Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2020*

* 1. **Kekerasan terhadap perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu aspek hukum yang saat ini mulai diketahui oleh masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan yang dapat terjadi bukan saja diluar rumah tetapi juga dalam rumah tangga. Sehingga saat ini telah ada UU KDRT yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan data DP2KBP3A Tahun 2020 di ketahui KDRT yang di laporkan 24 kasus, dengan penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Dari aspek kriminal tidak ditemukan pelaku perempuan, dan di dominasi oleh laki-laki. Bentuk pidana di dominasi oleh KDRT. Pada Tabel 8.6 ditunjukkan jumlah Narapidana dan Tahanan di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 518 laki-laki sebagai narapidana dan 14 perempuan, lebih jelasnya di tampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 8.6**

**Jumlah Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Jenis Kelamin**

**di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **L** | **P** | **Total** |
| **1.** | **Narapidana** | 339 | 14 | 353 |
| **2.** | **Tahanan** | 179 | - | 179 |
|  | **Jumlah** | **518** | **14** | **532** |

*Sumber : Lapas Kab. Bangka Tahun 2020*

**BAB IX**

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

**Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-undang tersebut memberi mandat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender. Mayoritas yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar tindak kekerasan terhadap anak sering terjadi di rumah anak itu sendiri, dengan jumlah yang lebih kecil terjadi disekolah,lingkungan,atau organisasi tempat anak berinteraksi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih sering kita temui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam keluarga biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh publik atau malu mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dilaporkan kepada pihak berwenang . Salah satu jenis lembaga Penegak Hukum yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan traficking terhadap perempuan dan anak adalah Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga lain yang secara terpadu berfungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Data jumlah korban yang mendapatkan pelayanan di Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A di Kabupaten Bangka tahun 2020 menurut kelompok usia dapat dilihat grafik di bawah ini.

**Tabel 9.1**

**Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Berdasarkan Usia Di Kabupaten Bangka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Kelompok Usia** | | | |
| **19-25** | **26-35** | **36-45** | **45 Keatas** |
| Januari | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maret | 1 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mei | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agustus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| September | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Desember | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | **10** | **1** | **5** | **10** |

*Sumber : UPTD PPPA Kab. Bangka Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi korban kekerasan lebih banyak pada usia 19 - 25 tahun dan diatas 45 tahun ke atas. Bila dilihat rentang usia korban ini maka di simpulkan korban merupakan kategori remaja dan dewasa. Hal ini dikarenakan pada fase usia ini perempuan pada umumnya sudah berumah tangga. Pada tabel 9.2 menunjukan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bangka Tahun 2020

**Tabel 9.2**

**Jumlah Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Anak**

**Di Kabupaten Bangka Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Kasus** | **Jumlah Kasus** |
| **1.** | **Penganiayaan** | 2 |
| **2.** | **Pencabulan** | 4 |
| **3.** | **Pelecehan** | - |
| **4.** | **Persetubuhan** | 7 |
| **5.** | **Pemerkosaan** | 2 |
| **6.** | **Pembunuhan** | - |
| **7.** | **Trafficking** | - |
| **8.** | **Penelantaran** | - |
| **9.** | **Perlarian** | - |
|  | **Jumlah** | **15** |

*Sumber : DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi korban kekerasan pada anak yang lebih banyak terjadi adalah kekerasan persetubuhan (seksual) yakni sebanyak 7 korban/kasus. Banyak hal yang menyebabkan kekerasan terhadap anak diantaranya pengaruh buruk media sosial, dan juga penyimpangan perilaku seksual dari pelaku. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa dimasa yang akan datang.

**Perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **KDRT** | **UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK** |
| 3 | 27 |

*Sumber : Pengadilan Negeri Kab. Bangka Tahun 2020*

**Jumlah Hakim yang menangani perkara kekerasan yang ada**

**Di Pengadilan Negeri Sungailiat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Seluruh Hakim** | **Jumlah Hakim yang menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak** |
| 9 (sembilan) orang | 9 (sembilan) orang |

*Sumber : Pengadilan Negeri Kab. Bangka Tahun 2020*

**BAB X**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan, yaitu stereotip atau pelabelan negatif, subordinasi dan marginalisasi perempuan, sekaligus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Adanya budaya ganggap bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Bagi perempuan kelas bawah yang notabene berpendidikan rendah, pekerjaan memberi peluang kepada mereka karena terkadang suatu pekerjaan tertentu tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Namun terkadang kesibukan perempuan pekerja terdapat dampak positif dan negatifnya yaitu menyebabkan interaksi antar warga kurang baik karena, setelah pulang dari langsung tidur dan istirahat. Hal ini, juga didukung kondisi ekonomi keluarga yang terjepit, sedangkan dampak positifnya yaitu dengan adanya perempuan dapat membantu pereknomian keluarga. Interaksi dalam masyarakat sangatlah penting untuk menjalin tali silaturrahim, tali kekerabatan diantara warga, apabila interaksi itu tidak dijalin dan dijaga baik maka hubungan kekerabatan antar warga maupun komunikasi akan menjadi renggang dengan sendirinya. Hubungan kekerabatan diantara warga khususnya tetangga sekitar rumah sangatlah penting, karena dengan adanya interaksi dan komunikasi hubungan tali silaturrahim antar warga menjadi baik dan semakin solid.

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada profil gender dan anak Kabupaten Bangka Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain :

1. Ketersediaan data

* + 1. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kabupaten Bangka untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang apakah sudah responsive gender.
    2. Data-data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan sampai Kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta deksripsi data yang sesuai dengan analisis gender dan anak
    3. Data-data yang tersedia dari berbagai sumber belum banyak yang dipilah

berdasarkan jenis kelamin.

d. Data masih perlu di rinci berdasarkan jenis kelamin, terutama data di BPS

masih banyak yang belum terpilah.

2. Kependudukan

* + - 1. Dari proyeksi penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2020 menunjukan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan yaitu sebesar 52% dari penduduk perempuan.
      2. Komposisi penduduk yang produktif lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.
      3. Pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka menunjukan bahwa 93,1 % penduduk yang telah memiliki akte kelahiran, hal ini menunjukan semakin meningkatnya partisipasi dalam pembuatan akte kelahiran.

1. Pendidikan
   * 1. Jumlah guru perempuan lebih besar dibandingkan dengan guru laki-laki yaitu sebesar 73,1 % hal ini menunjukan bahwa perempuan dianggap lebih cocok.
     2. Hampir seluruh penduduk Kabupaten Bangka sudah bisa baca tulis (99%), 1% penduduk perempuan yang masih buta huruf. Hal ini menunjukan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan.
     3. Perempuan memiliki angka partisipasi sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Dan menujukan bahwa cukup tinggi partisipasi gender pada pendidikan.
     4. Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka masih banyak pada tingkat SD dan tingkat SMA.

4. Kesehatan

1. Jumlah sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka sudah sangat memadai
2. Masyarakat Kabupaten Bangka sudah mulai menyadari betapa pentingnya proses persalinan. Hal ini terlihat dari sebagian besar proses persalinan sudah ditangani oleh tenaga kesehatan.
3. Dengan capaian imunisasi yang tinggi menunjukan keberhasilan pemerintah dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah kecacatan dan mengurangi angka kematian pada anak.
4. Angka kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 78 kasus yang terdapat di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Dimana Kecamatan Sungailiat merupakan tempat kasus tertinggi yakni 23 orang bayi.
5. Mayoritas perempuan menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil karena mudah didapat dan praktis.
6. Usia perkawinan pertama sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka adalah lebih tinggi di usia 21 tahun lebih. Yaitu sebesar 1223 untuk laki-laki dan sebesar 1090 untuk perempuan.
7. Masyarakat Kabupaten Bangka (terutama para ibu) sudah mulai menyadari betapa pentingnya pemberian asi eksklusif untuk anak (bayi) mereka. Hal ini disebabkan karena asi sangat bagus untuk tumbuh kembang anak-anak.
8. Jumlah balita gizi kurang di Kabupaten Bangka sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 361 jiwa atau 1,29 % untuk Tahun 2020 sedangkan Tahun 2019 sebesar 469 Jiwa atau 2,71%.
9. Penderita HIV/AIDS paling banyak terjadi pada kelompok usia 25-49 tahun yakni sebanyak 29 0rang.

5. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka sebesar 252 orang.

6. Publik

* + 1. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Bangka periode tahun 2019-2024 sebanyak 6 orang dari 35 orang jumlah anggota DPRD (17,14%). Jumlah PNS perempuan di Kabupaten Bangka tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki yaitu 2327 orang perempuan dan 1510 orang laki-laki.
    2. Pada bidang legislatif perempuan belum mendapatkan porsi yang seimbang, serta kedudukannya dalam komisi bukan pada posisi strategis atau sebagai pengambil keputusan.
    3. Potensi partisipasi perempuan di berbagai sektor baik sektor pemerintah maupun publik menunjukkan masih ada beberapa bidang yang kurang responsif gender.

7. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

* 1. Jumlah terbanyak korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kelompok umur 19 - 25 tahun dan diatas 45 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan pada fase usia ini perempuan pada umumnya sudah berumah tangga.
  2. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik dan tempat kejadian paling banyak ada di rumah tangga dan terjadi secara berulang.
  3. Perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga /ibu rumah tangga.
  4. Korban tindak KDRT tahun 2020 yaitu 24 kasus, terjadi peningkatan kasus dibanding tahun 2019 yang berjumlah 9 kasus.
  5. Jenis kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi di Tahun 2020 adalah kekerasan seksual yaitu 7 kasus.

**10.2 Saran**

1. Diharapkan pengambil kebijakan di Kabupaten Bangka diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka penyusunan pembangunan di segala bidang
2. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Bangka yang cukup baik belum mampu mengkoordinir kesempatan kerja bagi mereka sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, komunikasi yang lebih baik antar instansi /lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah, dan efektif.
4. Lembaga- lembaga yang menangani isu gender dan anak di Kabupaten Bangka perlu meningkatkan perannya lebih dalam lagi demi menyukseskan pembangunan yang berkeadilan gender.
5. Perlu sosialisasi tentang pentingnya data terpilah berdasarkan gender (jenis kelamin) ke semua instansi, agar menjadi database dalam penyusunan kebijakan program Kabupaten Bangka.
6. Perlu Pelatihan Penyusunan Program berbasis gender pada semua instansi (SKPD), pada pengambil keputusan di Kabupaten Bangka termasuk anggota DPRD. Agar ada kesamaan pandang terhadap pembangunan yang responsif gender.
7. Semua OPD harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsur agar mereka terlindungi serta ha-hak mereka terpenuhi.

Dari berbagai catatan tersebut terdapat beberapa sebab yang melatar belakanginya diantaranya adalah:

* + Belum dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan para pengambil kebijakan dan pelaksana program.
  + Belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya pengarusutamaan gender (PUG).
  + Pengarusutaaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan hak anak (PUHA) belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah.